

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026

Kata Pengantar



Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2021 – 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diterbitkan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Rencana Strategis (RENSTRA) diharapkan dapat diandalkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2021 – 2026 ini maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara lebih kongkrit.

Dokumen rencana strategis ini juga merupakan arahan dan pedoman kepada seluruh aparatur Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati, sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati tersebut dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan. Demikian Dokumen Rencana Strategis ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan dalam urusan perencanaan.

Tenggarong, 8 September 2021
Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT. S.IP., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 198803 1 014

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.1. LANDASAN HUKUM	2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	9
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	9
2.2. SUMBER DAYA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	12
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.....	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DIARPUS	26
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS & FUNGSI PELAYANAN.	26
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, & PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	28
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI	29
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
BAB VIII PENUTUP	68

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No.9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 54 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagai Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a). Perumusan Kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- b). Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
- c). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
- d). Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan,
- e). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 wajib disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sesuai dengan urusan kearsipan dan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini dilakukan dengan memformulasikan secara linear atas perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga dilakukan perumusan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang lebih terukur guna akselerasi pencapaian Visi dan Misi daerah sesuai dengan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 adalah:

- A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
- C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- D. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- L. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara;
- M. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara *Nomor 54 Tahun 2016, tentang* Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- N. Ditambahkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan dilingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan agar lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

B. Tujuan

Tujuan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsi
2. Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.
3. Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5. Untuk mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi kepada masa depan, serta peningkatan mutu berbagai produk perencanaan secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang

masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

- A. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- B. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- C. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- D. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- E. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Prioritas

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

A. Tugas Pokok

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya adalah perubahan lembaga yaitu dari Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Tugas Pokok yang berbeda. Adapun tugas pokok dari dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Karta sesuai dengan undang undang no 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 serta dituangkan ke dalam Perda No.9 Tahun 2016 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kearsipan dan perpustakaan.

B. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Karta adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

C. Struktur Organisasi

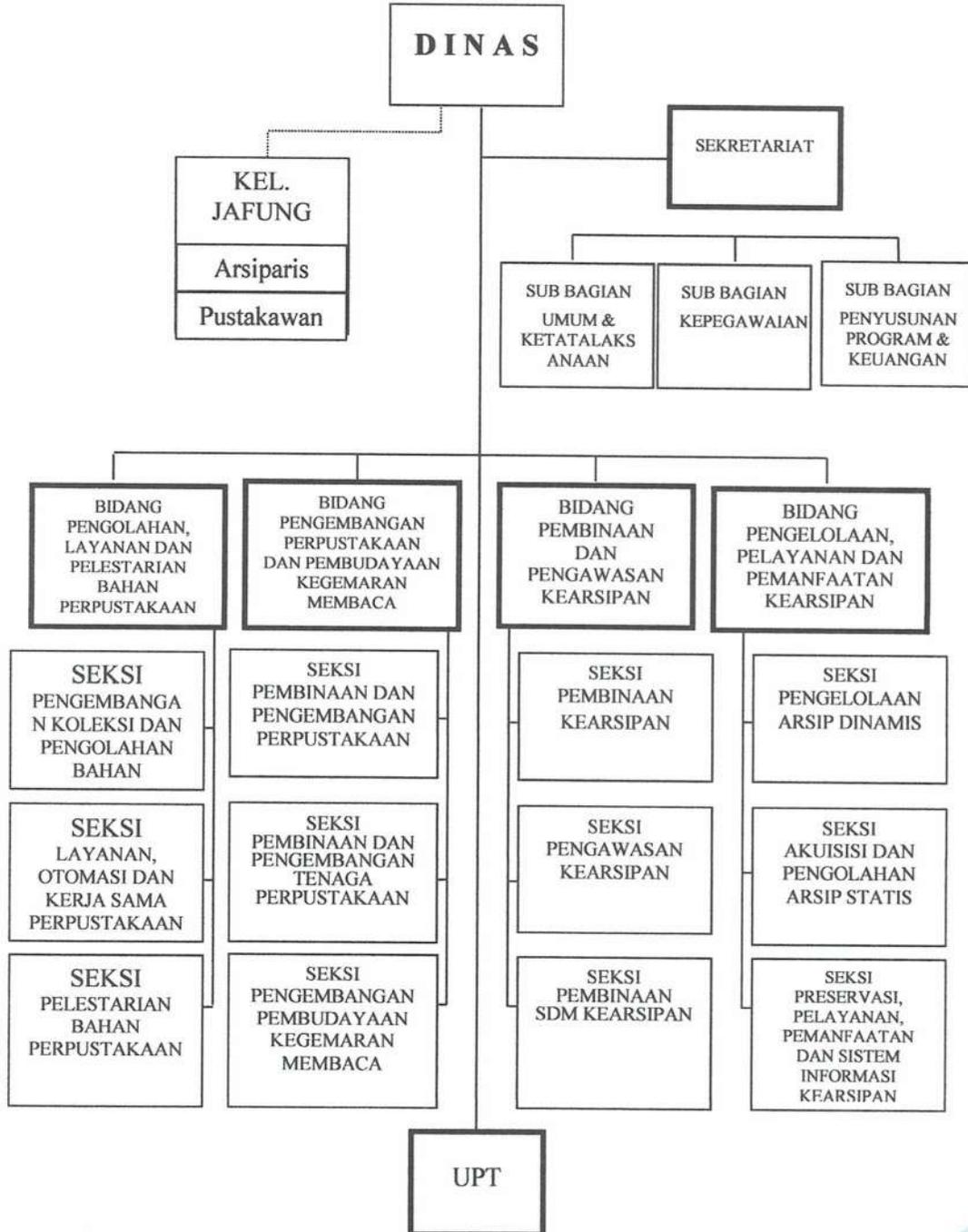
Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai

Kartanegara terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan;
 - 3. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan.
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 - 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bidang Pembinaan Kearsipan;
 - 2. Seksi Pengawasan Kearsipan;
 - 3. Seksi Pembinaan SDM Kearsipan.
- f. Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip Statis;
 - 3. Seksi Preservasi, pelayanan, pemanfaatan dan sistem informasi kearsipan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

A. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 95 orang. Perincian pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
(Per Desember 2020)

GOLONGAN	PANGKAT	GENDER		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
IV	c			
	b	2		2
	a	7	4	11
III	d	4	9	13
	c	5	2	7
	b	2	6	8
	a	1	2	3
II	d	17	19	26
	c	9	11	20
	b	3		3
	a	1		1
I	d	1		1
TOTAL		52	43	95

Tabel 2
Jumlah Pejabat Struktural
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara
(Per Desember 2020)

JABATAN	Pangkat/Gol	GENDER		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
ESELLON II	IV/d			
ESELLON III	IV/b	3	2	5
ESELLON IV	IV/a	8	6	14
TOTAL		11	8	19

Tabel 3
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
(Per Desember 2020)

JABATAN FUNSIONAL	Pangkat/Gol	GENDER		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Pustakawan				
15 Orang	III/d		1	1
	III/c	1		1
	III/b	1	1	2
	II/d	3	2	5
	II/C	3	3	6
Arsiparis				
5 Orang	III/d		1	1
	II/c	2	2	4
TOTAL		10	10	20

Tabel 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
(Per Desember 2020)

JABATAN	GENDER		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Magister (S2)	8	4	12
Sarjana (S1)	9	13	22
Diploma	3	1	4
SLTA	32	23	55
SLTP	1		1
SD	1		1
TOTAL	54	41	95

Tabel 5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
(Per Desember 2020)

JABATAN	GENDER		TOTAL
	LAKI	PEREMPUAN	
Pejabat Struktural	11	8	19
Fungsional Tertentu	10	10	20
Fungsional Umum	32	24	56
TOTAL	53	42	95

B. Fasilitas

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga publik yang juga bergerak dalam jasa layanan perpustakaan dan kearsipan memiliki sarana dan prasarana dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi dan bahan pustaka, sarana dan prasarana tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Gedung

Gedung kearsipan dan perpustakaan terbagi dalam 5 gedung yang berbeda :

- a. Gedung utama di Jalan Panji Tenggarong yang terdiri dari ruang Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca beserta 3 seksinya, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan beserta dua seksinya;
- b. Gedung Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan beserta 3 seksinya berada di depan gedung utama di jalan Panji Tenggarong;
- c. Gedung Record Center yang berada disebelah Gedung Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Di Jalan Panji Tenggarong
- d. Gedung Depo Arsip yang berada di Jalan KH. Dewantara Eks. Gedung Layanan Perpustakaan

- e. Gedung layanan perpustakaan yang menyatu dengan Taman Pintar berada dipusat kota dengan akses yang mudah berlokasi di Jalan Danau Semayang Tenggara. Gedung ini terdiri dari 2 lantai, lantai bawah terdiri dari ruang pembuatan kartu, ruang koleksi umum dan referensi, pojok BI corner, ruang koleksi anak-anak, ruang multi media dan taman baca indoor. Sedangkan lantai atas berisi aula pertemuan, ruang teater/studio film, ruang rapat/diskusi ruang pimpinan, ruang pengolahan dan perawatan bahan pustaka.

2) Koleksi Perpustakaan

Koleksi bahan pustaka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 31.580 judul 74.362 Eksemplar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Koleksi Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
(Per Desember 2020)

No	Golongan/Klasifikasi Buku	Jumlah	
		Judul	Eksemplar
1	000 Karya Umum	1.870	3.856
2	100 Filsafat	1.186	2.289
3	200 Agama	3.304	6.608
4	300 Ilmu-ilmu Sosial	5.578	9.302
5	400 Bahasa dan Linguistik	1.391	2.341
6	500 Ilmu-ilmu Murni	1.555	2.770
7	600 Teknologi (ilmu Terapan)	5.556	9.706
8	700 Kesenian dan Olahraga	1.529	2.293
9	800 Kesusasteraan	2.491	3.616
10	900 Geografi dan Sejarah	1.249	2.126
Jumlah		25.709	44.907

3) Koleksi Arsip

Khazanah arsip yang disimpan dan dipelihara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak Berkas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Jumlah Koleksi Arsip
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten
(Per Desember 2020)

No	Golongan/Klasifikasi Arsip	Jumlah Berkas	
		Arsip In Aktif	Arsip Statis
1	000 Umum		
2	100 Pemerintahan		
3	200 Politik		
4	300 Keamanan dan Ketertiban		
5	400 Kesejahteraan Umum		
6	500 Perekonomian		
7	600 Pekerjaan Umum		
8	700 Pengawasan		
9	800 Kepegawaian		
10	900 Keuangan		
Jumlah			

4) Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari mobil operasional kantor 2 unit sedangkan kendaraan operasional mobil perpustakaan keliling 4 unit

2.1 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah .

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan periode tahun lalu (2017-2020), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian kinerja yang kurang baik dan tidak sesuai target yang diharapkan. Hal ini disajikan di Tabel 1 (TC.23) yang memuat capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan empat tahun terakhir. Selain pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mulai Tahun 2017 sampai 2020, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Tabel 8.TC.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				59	60	65	75	80	59	60	62,1	69,27		1,00	1,00	0,96	0,92	
2	Pertumbuhan kunjungan ke perpustakaan				5,34	3,89	5,34	5,4	5,5	5,34	3,89	5,4	0		1,00	1,00	1,01	0,00	
3	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Daerah				35	60	65	75	80	35	60	84	94		1,00	1,00	1,29	1,25	
4	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun				0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	0,4	0,4	0,44	0,02		0,71	0,70	0,76	0,03	
5	Persentase perpustakaan desa / taman baca yang aktif				14	15	25	35	50	14	14	25	35		1,00	0,93	1,00	1,00	
6	Jumlah dokumen arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				79.286	83.868	88.448	10.867	10.866	79.286	83.868	88.448	10.867		1,00	1,00	1,00	1,00	
7	Cakupan PD yang terkoneksi dengan sistem informasi kearsipan							2	69				0					0,00	
8	Persentase OPD yang menerapkan Arsip secara baku				50	70	75	80	82	50	70	75	100		1,00	1,00	1,00	1,25	

Dari total 8 (delapan) Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, hanya 3 indikator yang realisasinya sesuai target, 4 indikator realisasinya mendekati target yang telah ditetapkan dan 1 indikator yang belum dapat dilaksanakan.

Tabel 3 TC.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	325.000.000	180.000.000	1.655.000.000	1.282.216.173	1.450.000.000	325.000.000	0	1.367.706.880	1.267.833.493		1	0	0,83	0,99	0		
Program Pembinaan dan Pengelolaan Kearsipan	342.500.000	0	2.303.785.600	1.033.540.600	950.000.000	342.500.000	0	1.674.679.363	972.917.298		1	0	0,73	0,94	0		

Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 3 (TC.24) diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami tren peningkatan (positif) yaitu berkisar rata-rata 2 tahun terakhir sebesar 0,91 % untuk urusan Perpustakaan sedangkan untuk urusan Kearsipan sebesar 1,84 %.

Pada umumnya penyerapan anggaran sudah optimal, hal ini disebabkan anggaran untuk urusan kearsipan dan perpustakaan relatif minim, sehingga diperlukan anggaran yang cukup untuk mencapai target indikator untuk urusan kearsipan dan perpustakaan yang telah ditetapkan.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

A. Tantangan

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Dalam hasil pendataan BPS Pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai **3.575.449 jiwa**, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk (2016-2020) sebesar **2,12%**. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan **Tenggarong** dengan besaran **4,16** persen dan pertumbuhan terendah di Kecamatan **Muara Wis** sebesar **0,47** persen. Sementara, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 tercatat **28,08 jiwa/km²**.

Pada tahun 2020 distribusi penduduk terbesar berada di Kecamatan Tenggarong yaitu sebanyak **812.600 jiwa (23,71%)**, yang merupakan ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Selibuhnya berada di Kecamatan sebanyak **717.800 jiwa (20,94%)**, Kecamatan... sebanyak **615.600 jiwa (17,96%)** dan tersebar di Kecamatan lain berkisar **0,76 – 9,34%**, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 19
Perkembangan Jumlah Penduduk Kalimantan Timur
Tahun 2016 - 2020 (jiwa)

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
Tabang					
Kembang Janggut					
Kenohan					
Muara Wis					
Muara Muntai					
Kota Bangun					
Muara Kaman					
Sebulu					
Tenggarong					
Tenggarong Seberang					
Isa Kulu					
Isa Janan					
Sanga-Sanga					
Muara Jawa					
Samboja					
Anggana					
Muara Badak					
Maragkayu					
Kutai Kartanegara	3.199.696	3.275.844	3.351.432	3.426.638	3.501.232

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Keseluruhan jumlah masyarakat Kutai Kartanegara yang begitu besar merupakan pemustaka potensial (*potential user*) yang menjadi sasaran pelayanan perpustakaan. Agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dan membuat semuanya menjadi pemustaka riil (*actual user*) diperlukan usaha yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.

2. Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat Masyarakat

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun. Hasil survey yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional terhadap nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah sebesar 62,0 namun untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara belum pernah dilakukan survey.

3. Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) meliputi Pemerataan layanan Perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, perpustakaan ber-NSP, anggota perpustakaan dan aspek masyarakat (AM). Hasil sensus yang dilakukan Perpustakaan Nasional terhadap Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kalimantan Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 33 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 20 indeks, namun untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara belum pernah dilaksanakan sensus.

4. Persepsi yang salah terhadap arsip

Selama ini, terdapat anggapan bahwa arsip merupakan limbah administrasi yang tidak berharga sehingga tidak dikelola secara khusus. Anggapan ini semakin parah manakala para pimpinan instansi tidak memahami tentang peran dan fungsi arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

peningkatan jumlah penerbitan bahan perpustakaan tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, brosur dan lain-lain, bahan terekam seperti CD/DVD maupun bahan yang tersedia secara **online** dalam jaringan internet dapat dikumpulkan, diolah dan disebarluaskan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan kepastakawanan. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari Perangkat Daerah-Perangkat Daerah serta membuka / membina perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara. Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap Perangkat Daerah. Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustakabaik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah koleksi. Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahanpustaka yang lebih banyak dan berkualitas.

Tantangan dan peluang pengembangan dan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga diidentifikasi melalui analisa kekuatan , kelemahan, peluang dan tantangan yaitu ;

1. Kekuatan

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Adanya kewenangan penyusunan Rencana dan Program Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
- c. Semakin meningkatnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

5. Kurangnya SDM Kearsipan

Salah satu penyebab hambatan dalam penyelenggaraan kearsipan dewasa ini di instansi pemerintah karena disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia kearsipan yang profesional, yaitu arsiparis. Jumlah Arsiparis adalah sebanyak 5 orang, yang berada di Lembaga Kearsipan Daerah sedangkan Perangkat Daerah lain belum ada yang memiliki tenaga arsiparis, Sehingga tak heran apabila kondisi kearsipan di instansi tersebut kurang baik.

6. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Secara umum, permasalahan yang timbul dalam sarana dan prasarana kearsipan adalah banyaknya instansi pemerintah yang belum membangun atau menunjuk tempat khusus yang representatif sebagai tempat penyimpanan dan pengamanan arsip. Padahal sebagaimana diketahui, setiap lembaran arsip itu merupakan rekaman kegiatan yang kelak dapat dijadikan sebagai bahan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintahan yang harus diselamatkan keberadaannya.

Dengan adanya depo atau tempat penyimpanan arsip yang representatif, maka arsip-arsip yang ada didalamnya dapat terjaga sehingga informasi yang terdapat didalam arsip dapat dijaga dari orang-orang yang tidak berhak mengetahuinya.

B. Peluang

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara diprediksi pada tahun 2018 berjumlah 3.351.432 jiwa, meningkat menjadi 3.426.638 Jiwa pada tahun 2019, dan akhirnya menjadi 3.501.232 jiwa pada akhir 2020. Berdasarkan standar pelayanan dan pengelolaan yang ada, maka perlu diantisipasi serta diperkirakan tingkat kebutuhan akan sarana/prasarana serta fasilitas pendukung kerja maupun jumlah staf pengelola, sesuai dengan rasio ideal yang ada. Peningkatan jumlah ketersediaan informasi baik berupa

2. Kelemahan

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- b. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan dan lembaga kearsipan.
- c. Belum optimalnya peran dan fungsi Unit Kearsipan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan
- d. Terbatasnya Kompetensi SDM di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- e. Sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan yang belum lengkap

3. Peluang

- a. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah perpustakaan dan unit pengelola kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang membutuhkan pengembangan dan pembinaan
- b. Perkembangan telekomunikasi dan teknologi informasi
- c. Berkembangnya IT untuk akses perpustakaan dan kearsipan
- d. Banyaknya koleksi bahan perpustakaan dan kearsipan.

4. Ancaman

- a. Berkembangnya kompetitor yang bergerak dibidang penyediaan bahan pustaka dan kearsipan
- b. Gerakan minat baca dan masyarakat sadar arsip belum tumbuh secara baik
- c. Belum optimalnya kesadaran lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan perundang undangan perpustakaan dan kearsipan
- d. Luas wilayah sebaran pemustaka
- e. Perubahan regulasi yang menyangkut kelembagaan maupun penyelenggaraan administrasi pemerintahan
- f. Tidak tegasnya sanksi hukum terhadap orang yang menghilangkan arsip.

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kearsipan dan Perpustakaan

Identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan atas kondisi real yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengembangan dan pembinaan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dengan memperhatikan dan menganalisis secara mendalam kondisi lingkungan internal dan eksternal yang begitu dinamis, dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahan yang menjadi isu dalam pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Pemetaan Permasalahan Kearsipan dan Perpustakaan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum dilakukan survey atau kajian untuk mengukur Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Rendahnya Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Rendahnya Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
		Mimimnya kegiatan Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca
Belum dilakukan sensus untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Belum memiliki naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Belum memiliki koleksi Naskah Kuno
		Belum memiliki koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
Rendahnya Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B	Minimnya Jumlah Arsip Yang Dikelola	Arsip dinamis belum dikelola dengan baik
		Arsip Statis belum dikelola dengan baik
		Belum dikelolanya arsip secara digital

Tingkat ketersediaan arsip belum lengkap	Rendahnya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Minimnya kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
		Belum dilaksanakannya kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK
		Terbatasnya kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota dengan NSPK
		Rendahnya tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK
		Belum dilaksanakan kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK
		tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum memuaskan	Rendahnya predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum terintegrasi
		Penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan
		Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah belum dikelola dengan baik
		Dokumen Administrasi Kepegawaian belum dikelola dengan baik
		Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah belum maksimal
		Terbatasnya waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026, maka visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

Visi:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

SEJAHTERA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan.

BERBAHAGIA:

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman, diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian dan gotong royong, berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi :

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**
Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada Penguatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Kualitas Layanan publik, Fasilitasi Kesejahteraan ASN, dan Penerapan Kerjasama Pemerintah Daerah
2. **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya**
Dengan sasaran kebijakan pembangunan pada peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kualitas Layanan Kesehatan, Kompetensi Tenaga Kerja, Kualitas Layanan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian Budaya Daerah
3. **Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas, Optimalisasi Potensi Wisata ALAM, SEJARAH DAN BUDAYA, dan Pengembangan UMKM

4. **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**

Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Infrastruktur Wilayah, Perumahan, Air Bersih, dan Energi

5. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan**

Dengan sasaran kebijakan pada pembangunan Pembangunan Daerah berbasis Lingkungan Hidup Yang Lestari

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, maka Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung pelaksanaan misi ke 1 yaitu **Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani**. Bentuk tanggungjawab dan dukungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, melalui peningkatan layanan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan yang lebih modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

C. Telaahan Renstra K/L.

A. Telaahan RENSTRA Perpustakaan Nasional.

Berdasarkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2019 maka Visi yang diemban adalah

“ Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan “

dan untuk mewujudkan visi tersebut misi yang dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir;

2. Mengembangkan disverifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas;
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional;
5. Menggalakan sosialisasi/ promosi/ pemasyarakatan gemar membaca;
6. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan nasional yang modern

Sasaran jangka menengah adalah:

1. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca;
2. Pengembangan semua jenis perpustakaan;
3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan;
4. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan;
5. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia;
6. Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern;

Dalam melaksanakan misi tersebut, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mensinergikan program kegiatan melalui pemberian bantuan / stimulan berupa sarana perpustakaan kepada pemerintah kabupaten / kota , desa / kelurahan, pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pengembangan sumber daya manusia. Program tersebut didukung oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan supervisi, monitoring dan stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi.

B. Telaahan RENSTRA Arsip Nasional Republik Indonesia

Berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2005-2019 maka Visi ANRI adalah Mewujudkan Visi

“ Arsip Sebagai Pilar Good Governance Dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”

ditempuh melalui 6 (Enam) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

Sasaran jangka menengah adalah:

1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional;
2. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
4. Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan.

C. Telaahan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023, maka visi dan misi Kalimantan Timur dalam RPJMD adalah:

Visi: “BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT “

Misi :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendukung pelaksanaan misi ke 1 yaitu **Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L adalah :

Tabel 20
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Pogram Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi 1 Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani</p> <p>Urusan : - Perpustakaan - Kearsipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SDM fungsional Arsipais dan fungsional pustakawan belum tersertifikasi dan minim kompetensi - Penyediaan bahan bacaan dan promosi perpustakaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat - Penyediaan informasi kearsipan belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya minat ASN tenaga fungsional bidang kearsipan dan fungsional pustakawan dan masih minimnya dukungan OPD dalam menyediakan formasi tersebut dalam instansi masing masing - Kondisi geografis, - Perhatian pemerintah akan keberadaan perpustakaan masih sangat kurang, - Banyak desa terpencil yang belum terlayani perpustakaan - Terbatasnya anggaran - Minimnya dukungan OPD terhadap Pentingnya Arsip - Minimnya pengguna Informasi dalam memanfaatkan layanan kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM fungsional Arsiparis dan Fungsional Pustakawan sangat dibutuhkan oleh SKPD/Lembaga/Organisasi - Kerjasama yang baik dengan pengelola semua jenis perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memberikan perhatian kepada perpustakaan - Pengembangan layanan perpustakaan digital - Membuka kerjasama dengan OPD dalam hal pengelolaan arsip secara digital - Masyarakat pengguna informasi berhak Mendapatkan informasi kearsipan secara cepat dan akurat

Tabel 21
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Urusan Perpustakaan

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraK/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Jumlah Koleksi yang kurang memadai,serta proses Pengadaan koleksi yang lama, serta kurangnya pengelola pada perpustakaan Desa	Anggaran kurang memadai, Layanan paket koleksi untuk masyarakat belum memadai. SDM pustakawan minim kompetensi	a. Perpustakaan stasioner sudah ada di 10 (sepuluh)wilayah kota b. Perlunya Perpustakaan tingkat Kelurahan dan kecamatan untuk ikut berperan.
2	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Minimnya koleksi perpustakaan Digital	SDM IT belum memadai	Sudah tersedianya perpustakaan digital (iKukar)
3	Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.	Jumlah titik layanan perpustakaan dan tenaga pustakawan dan tenaga teknis kurang memadai, Kecilnya alokasi anggaran untuk pengembangan Kompetensi Pegawai	Luasnya jangkauan layanan yang akan dilayani	a. TerciptanyaCPTAdanprogr am diklattenaga teknis IT b. ISO untuk manajemen mutu layanan

4	Peningkatan kualitas SDM perpustakaan	Masih kurangnya SDM di bidang perpustakaan	Masih rendahnya minat ASN untuk masuk kedalam jabatan fungsional Pustakawan	Dilaksanakannya diklat pustakawan dan diklat diklat tenaga perpustakaan, serta penjurangan tenaga fungsional melalui Inpassing
5	Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.	Perlunya reward dan punishment bagi penerbit yang berprestasi dalam mematuhi UU dan Perda KCKR, dan belum representatifnya sarana dan prasarana pelestarian koleksi	a. Belum semua Penerbit mematuhi regulasi KCKR b. Belum adanya kebijakan tentang Konsep Perpustakaan lokal cultureagen	a. Telah Terhimpunnya koleksi hasil tentang Kalimantan b. Telah tersedia layanan khusus koleksi Kalimantan

Tabel 22
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Urusan Kearsipan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional	Jumlah anggaran yang kurang memadai, serta masih kurangnya tenaga arsiparis arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	Anggaran kurang memadai, SDM Arsiparis kurang.	Penjurangan tenaga Arsiparis melalui mekanisme Inpassing
2	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Belum terintegrasinya aplikasi dalam satu sistem, perlunya interoperability atau satu gateway system dalam mewadahi semua perkembangan aplikasi	SDM IT belum memadai, budaya kerja IT belum sempurna	Telah disediakan aplikasi berbasis IT yang di sediakan oleh ANRI
3	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Tenaga IT untuk mengadopsi system yang telah dibuat masih kurang	Kurangnya tenaga IT untuk mengoperasikan system dimaksud	Telah dilaksanakannya diklat untuk pelaksanaan system tersebut untuk tingkat kearsipan provinsi
4	Terwujudnya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas kinerja yang profesional dan transparan	Kurangnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipan	Masih rendahnya kesadaran tentang tertib arsip	Dilaksanakannya Bimbingan dan konsultasi urusan kearsipan
5	Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan mutakhir dan pelestarian koleksi warisan budaya bangsa Indonesia.	Masih rendahnya minat masyarakat untuk menyerahkan arsip yang bersifat sejarah kepada pemerintah	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam usaha penyelamatan dokumen penting	Terbentuknya record center Terbangunnya Data Center
6	Mewujudkan usaha-usaha pembinaan kearsipan secara nasional di lingkungan lembaga aparaturnegara	Pembinaan terhadap unit kearsipan di Perangkat Daerah/UKPD belum optimal	Belum adanya arsiparis pada Perangkat Daerah/UKPD	Adanya keberlanjutan penyelenggaraan Pengembangan wawasan kearsipan, Diklat dan Bimtek Kearsipan
7	Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan Nasional yang modern.	Belum lengkapnya regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyediaan alamat arsip	Penyerahan Dokumen dalam usaha penyelamatan dokumen penting masih sedikit	Telah adanya Regulasi wajib serah arsip (pergub No.79/2005), Pengelolaan Arsip statis (Pergub. No.91/2010). Pelaksanaan kegiatan akuisisi untuk menambah khazanah arsip statis

Tabel 22
Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra OPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan minat baca didaerah	Upaya-upaya peningkatan minat baca terus dilakukan	Anggaran kurang memadai, Layanan paket koleksi untuk masyarakat belum memadai. SDM pustakawan kurang.	Masyarakat berhak Menerima layanan/fasilitas dari pemerintah
2	Pembangunan dan pengembangan perpustakaan sampai ke desa/kelurahan	Mendorong terbentuknya lembaga-lembaga perpustakaan didaerah	Letak Geografis Kalimantan Timur yang sangat luas serta anggaran yang masih sangat terbatas	Masyarakat berhak Menerima layanan /fasilitas dari pemerintah
3	Meningkatkan masyarakat sadar dan tertib arsip	Upaya-upaya sosialisasi tentang arti penting arsip	Luasnya jangkauan layanan yang akan dilayani	Arsip adalah penyelamat bangsa
4	Pengembangan SDM Kearsipan dan SDM Perpustakaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan	Minimnya minat ASN untuk memilih jabatan fungsional arsiparsip dan fungsional pustakawan serta masih kurang penyediaan formasi bagi kedua jabatan tersebut	Setiap lembaga /organisasi harus memiliki tenaga pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan agar tata kelola kearsipan dan perpustakaan tertata dengan baik

3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan (tahun 2021 - 2026), Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mempengaruhi kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis, dalam hubungannya dengan pengembangan bidang perpustakaan dan kearsipan, disesuaikan dengan wilayah yang diproyeksikan untuk pengembangan pendidikan dan pemukiman padat penduduk. Idealnya tiap-tiap wilayah di kecamatan diharapkan ada 1 (satu) perpustakaan umum yang dibangun dekat dengan pusat pemerintahan atau wilayah pendidikan atau pemukiman penduduk. Wilayah yang belum dibangun perpustakaan, secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling. Untuk itu diperlukan armada mobil perpustakaan keliling yang cukup. Kemudian untuk wilayah perkotaan, di beberapa sudut yang strategis dapat dibangun taman bacaan atau sudut baca..

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, yaitu:

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi

berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Kabupaten Kutai Kartanegara menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah Kabupaten perlu

membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya

Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.

Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat

mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiperah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. E- Library memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses koleksi perpustakaan, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKukar, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Kabupaen Kutai Kartanegara. Karena itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum

kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih, seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedangkan arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai. Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting

negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/ riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan

hal-hal hedonistis lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat kota seperti masyarakat urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.

Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat

ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74 % yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/ desa/ kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28 % yang memiliki perpustakaan.

D. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan

Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi pustaka.

Pada saat ini, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki koleksi umum sejumlah 25.709 judul (44.907 eksemplar). Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang dihasilkan oleh penerbit.

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Lain hal Khasanah arsip statis yang dimiliki Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga melalui akuisisi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, melalui pembangunan Perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Bupati. Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan tersebut dilihat dari:

- A. adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
- B. adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- C. adanya keterkaitan dan konsistensi antara Pembuat Kebijakan, Pengawasan (Auditor), pelaksanaan (Operator) dan Masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya; serta
- D. integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan perpustakaan dan kearsipan dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra Perangkat Daerah. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2021-2026.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2021-2026 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Tabel Tc. 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

TUJUAN	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perang kat Daerah Penan gung Jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat				Nilai Keagamaan Membaca Masyarakat	Nilai	NN	62	62,5	63,3	63,5	64	64	64	64	64	64	64		DIARPUK	Kab. KUKAR
Terwujudnya Penyelenggaraa n perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	NN	13	14	15	16	17	17	17	17	17	17	17		DIARPUK	Kab. KUKAR
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada Perangkat Daerah				Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B	Persen	15,5 2	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100		DIARPUK	Kab. KUKAR
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional				Tingkat ketersediaan arsip	Persen	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100		DIARPUK	Kab. KUKAR

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan capaian kinerja dalam suatu organisasi. Penggunaan indikator kinerja perlu diperhatikan jika indikator tersebut akan diterapkan dalam pemberian rekomendasi pada program yang dijalankan. Kriteria indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok organisasi meliputi : spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu :

1. Indikator Masukan (Input)

Indikator ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya

2. Indikator Proses (Process)

Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran

3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator ini menunjukkan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik

4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator ini menunjukkan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Setelah menentukan semua indikator kinerja yang berkaitan, tahap selanjutnya adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan. Salah satu aspek dari setiap usaha yang

dilakukan adalah apakah usaha tersebut akan berhasil diselesaikan (sukses) untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Rumusan program/kegiatan yang baik harus memiliki kriteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, time). Untuk memenuhi kriteria tersebut perlu dikembangkan indikator kinerja yang terukur dan dapat mencapai target dari masing-masing program.

Tabel TC. 28

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	NN	62	62,50	63,30	63,50	64	64
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NN	13	14	15	16	17	17
3	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	1,9	26,44	32,08	37,38	42,34	46,98	46,98
4	Jumlah Perpustakaan yang Terakreditasi	1	3	3	3	3	3	16
5	Jumlah naskah yang dialih mediakan	0	5	5	5	5	5	25
6	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B	15,52	25	50	75	100	100	100
7	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	75	80	85	90	95	100	100
8	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	34,13	50	65	80	95	100	100
9	Jumlah Arsip Yang Dikelola	58.181	60.681	63.181	65.681	68.181	70.681	70.681
10	Prosentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara elektronik/digital	0	20	50	80	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stake holders) Kearsipan dan perpustakaan guna mengakomodir kepentingan masyarakat melalui akselerasi pembangunan perpustakaan dan budaya baca serta pengelolaan arsip sebagai sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan diperlukan sumber daya dan dana yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung ketata pemerintahan yang baik (good governance).

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan arah dan pedoman pengembangan perpustakaan dan kearsipan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, kebijakan maupun program/kegiatan yang terukur sebagai indikator kinerja pada pencapaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.